ABSTRAK

Kebijakan merupakan sekumpulan tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang diambil oleh para aktor dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks administrasi publik, kebijakan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian saat ini adalah meningkatnya praktik judi online yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Di Kota Lhokseumawe, praktik judi online masih sering terjadi sehingga diperlukan kerja sama berbagai aktor dalam jejaring kebijakan untuk memberantasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam jejaring kebijakan serta menganalisis peran dan kontribusi masing-masing aktor dalam upaya pemberantasan judi online di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi aparat kepolisian, Satpol PP/Wilayatul Hisbah, pemerintah daerah, serta masyarakat yang terkait dengan penanganan kasus judi online. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jejaring kebijakan pemberantasan judi online terdapat beberapa aktor utama seperti kepolisian, Satpol PP/Wilayatul Hisbah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masing-masing aktor memiliki peran yang berbeda, mulai dari pengawasan, sosialisasi, patroli, razia gabungan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Namun, koordinasi antar aktor dalam jejaring kebijakan masih belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, teknologi, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaian masalah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar instansi, kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemantauan serta pemblokiran situs judi online, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif judi online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jejaring kebijakan dalam pemberantasan judi online di Kota Lhokseumawe telah terbentuk, namun masih perlu diperkuat melalui kolaborasi yang lebih efektif agar upaya pemberantasan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: jejaring kebijakan, pemberantasan, judi online

ABSTRACT

Policies are a set of actions, attitudes, program plans, and decisions taken by actors in an effort to solve problems that occur in society. In the context of public administration, policy has an important role in regulating and directing government actions to achieve certain goals. One of the social problems that is of concern today is the increasing practice of online gambling which has a negative impact on the social, economic, and moral life of the community. In Lhokseumawe City, online gambling practices still occur frequently, so the cooperation of various actors in the policy network is needed to eradicate it. This study aims to find out the actors involved in the policy network and analyze the role and contribution of each actor in efforts to eradicate online gambling in Lhokseumawe City. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The informants in this study include police officers, Satpol PP/Wilayatul Hisbah, local governments, and communities related to handling online gambling cases. Data analysis is carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that in the online gambling eradication policy network there are several main actors such as the police, Satpol PP/Wilayatul Hisbah, local governments, and the community. Each actor has a different role, ranging from supervision, socialization, patrols, joint raids, to law enforcement against online gamblers. However, coordination between actors in the policy network is still not running optimally due to limited resources, technology, and low public awareness. Efforts to solve the problem are carried out through increased coordination between agencies, cooperation with the Communication and Information Service in monitoring and blocking online gambling sites, and increasing socialization to the public about the negative impact of online gambling. Thus, it can be concluded that the policy network in eradicating online gambling in Lhokseumawe City has been formed, but it still needs to be strengthened through more effective collaboration so that eradication efforts can run optimally and sustainably.

Keywords*: eradication, online gambling, policy network*